



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



# Pemanfaatan Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial di Kota Tanjung Balai

---

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

September 2017

# Tantangan Terbesar Saat Ini

## MISKIN & RENTAN

### Kemiskinan

- Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan pada Maret 2017 (nasional) sebanyak 27,77 juta orang atau 10,64%.
- Untuk Kota Tanjung Balai sebanyak: **25.090 orang**, dalam persentase : **15.08 %** (BPS, 2015)

### Kerentanan

- Sebagian penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan sesungguhnya **masih rentan** jatuh ke kemiskinan.

# Penanggulangan Kemiskinan



## Menurunkan Beban Pengeluaran

## Meningkatkan Pendapatan

Program Perlindungan Sosial



Data Terpadu sebagai Instrumen Utama

- Pemberdayaan masyarakat
- Dukungan pengembangan usaha mikro (KUR)
- Pelatihan kerja (BLK)
- Pendampingan usaha sektoral (KUBE)

Kebijakan dan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

# **Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM)**

---

***TNP2K merupakan forum koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan***

### **TUGAS TNP2K**

Perpres No. 15 Tahun 2010 dan  
Perpres No. 96 Tahun 2015

- a. Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan
- b. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, TNP2K dibantu oleh Sekretaris Eksekutif

### **Mandat Utama**

**2010 - 2015**

- a. Memperbaiki sasaran program berbasis rumah tangga dan wilayah
- b. Memperbaiki mekanisme penyaluran program

## Struktur Organisasi TNP2K

Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010  
Tentang Percepatan Penanggulangan  
Kemiskinan



## Dasar Hukum

### Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

#### Dasar-dasar Hukum

#### Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011

tentang Penanganan Fakir Miskin

**Pasal 8-10 :** Pendataan fakir miskin

**Pasal 11 :** Penetapan

#### Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik

**Pasal 26 :** Perlindungan hak pribadi

#### Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

**Pasal 2 dan 6 :**

Pengecualian informasi publik

#### PP No. 82 tahun 2012

tentang Sistem dan  
Transaksi Elektronik

**Pasal 15 :**

Kerahasiaan data pribadi

**Keputusan Menteri Sosial Nomor 57/HUK/2017**  
tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

# Pokja Pengelolaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

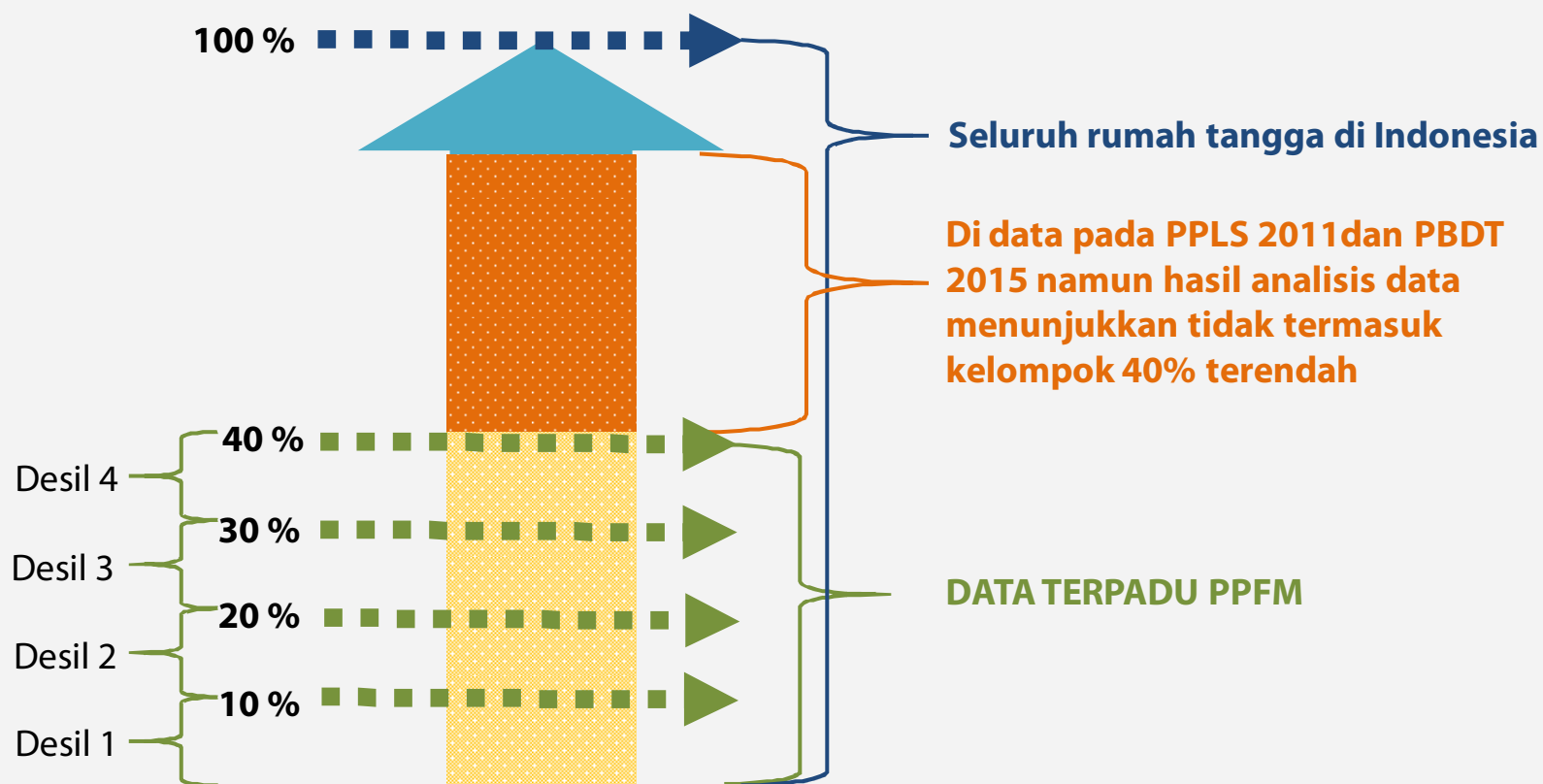


**Menteri Sosial telah membentuk Pokja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin SK Nomor 284/HUK/2016, dengan susunan sebagai berikut:**

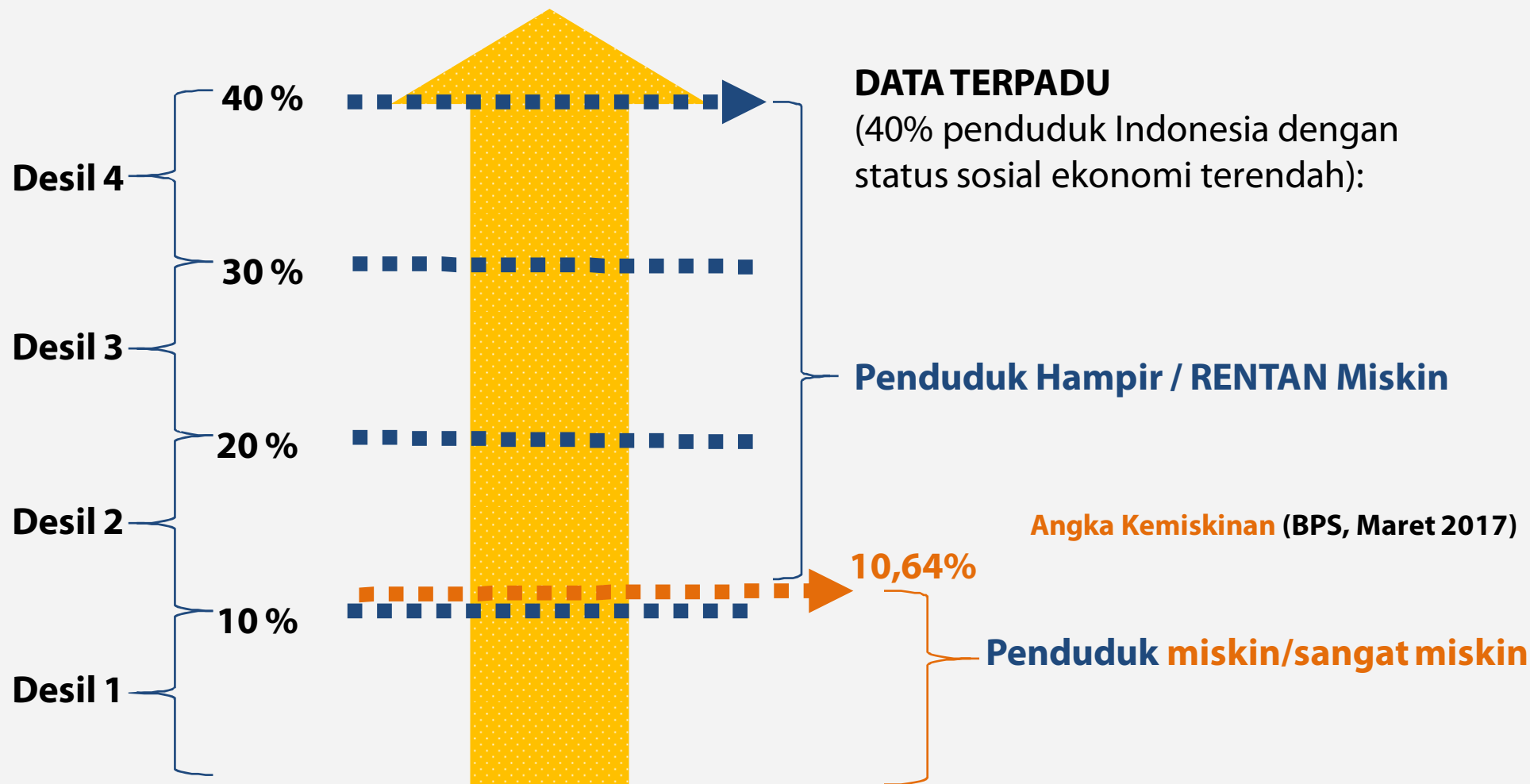
- 1. Pengarah:** Menteri Sosial Republik Indonesia
- 2. Penanggung Jawab:**
  1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
  2. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
  3. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  4. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
  5. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri
  6. Deputi Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
  7. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik
- 3. Ketua:** Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial
- 4. Tim Teknis:** Gabungan Staff Menko PMK, Kemensos, TNP2K, Kemendagri, Bappenas dan BPS



# Pengelompokan Rumah Tangga dalam Data Terpadu PPFM



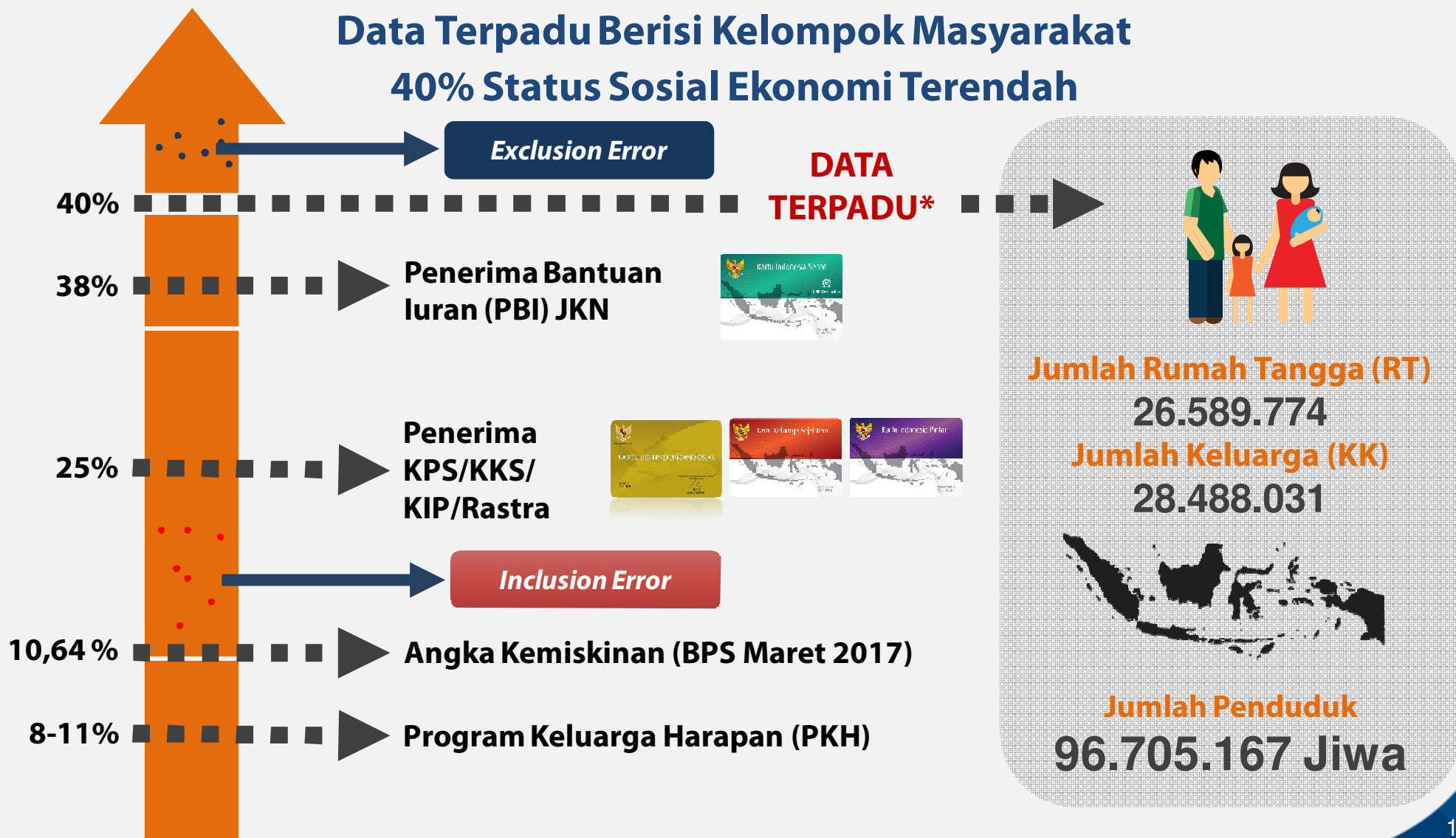
# Kenapa BDT/Data Terpadu PPFM **BUKAN** Data Kemiskinan??



Seluruh Desil 1=RTM/SM; Hampir seluruh Desil 2 hingga 4 = RT hampir miskin / rentan miskin

# Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

Data Terpadu Berisi Kelompok Masyarakat  
40% Status Sosial Ekonomi Terendah



# Mekanisme Pemutakhiran BDT 2015



## Forum Konsultasi Publik (FKP)

### Pelaksanaan FKP



### Serah terima hasil FKP ke TKPK



FKP dipimpin oleh fasilitator dari masyarakat, bukan organik BPS dan Kades setempat





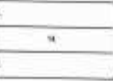




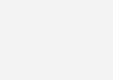
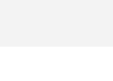
# Berita Acara (BA) Pengesahan Hasil FKP

**BERITA ACARA  
FORUM KONSULTASI PUBLIK PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU 2015**

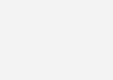
1	Provinsi	JAWA TENGAH	33
2	Kabupaten/Kota	TEGAL	76
3	Kecamatan	TEGAL TIMUR	030
4	Desa/Wilayah (Kode)	MINTARAGEN	005

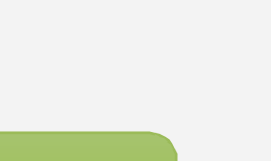
Hari/Tanggal: \_\_\_\_\_  
Pukul: \_\_\_\_\_  
Tempat: \_\_\_\_\_

Dengan ini kami menyatakan:  
Bahwa telah ikut berpartisipasi dalam Forum Konsultasi Publik dalam rangka Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 di wilayah ini dan menyetujui bahwa rumah tangga/keluarga hasil Forum Konsultasi Publik ini seluruhnya akan didata, tetapi penertama program bantuan akan ditetapkan oleh pemerintah.

No.	Nama SLS satu tingkat di bawah desa/kecamatan	Jumlah RTS PBDT 2015	Jumlah RTS PBDT 2014	Jumlah	Nama Kepala Desa/RTS di satu tingkat di bawah kecamatan	Tanda tangan
1.	RW I	72	0	72	MARULANI	
2.	RW 03	33	2	35	MUNIF HIDAYAT	
3.	RW IX	204	2	206	Forum	
4.	RW E	246	4	250	Forum	
5.	RW 02	63	3	66	M. Sadie	
6.	RW 05	65	6	71	M. Sadie	
7.	RW 04	104	4	108	SINTO, S. E	
8.	RW 06	30	1	31	MADI PRAMANA	
9.	RW 07	108	3	111	Forum	
10.	RW 08	86	4	90	Forum	
11.	RW 11	406	43	449	Forum	
12.						
13.						
14.						
15.						
Total						

Catatan: \_\_\_\_\_

  
 Kepala Desa  
 MINTARAGEN



\*) Cetak yang tidak sesuai

Tanda Tangan  
Ketua SLS/Tomas  
pada saat FKP

Jumlah RTS PBDT 2015  
hasil FKP pada setiap SLS  
satu tingkat di bawah desa

Cap Stempel dan Tanda  
Tangan Kepala Desa

## Pendataan dan *Entry Data* PBDT15

Pendataan rinci terkait karakteristik rumah tangga (hasil FKP) oleh petugas yang berasal dari masyarakat setempat



### *Entry Data*

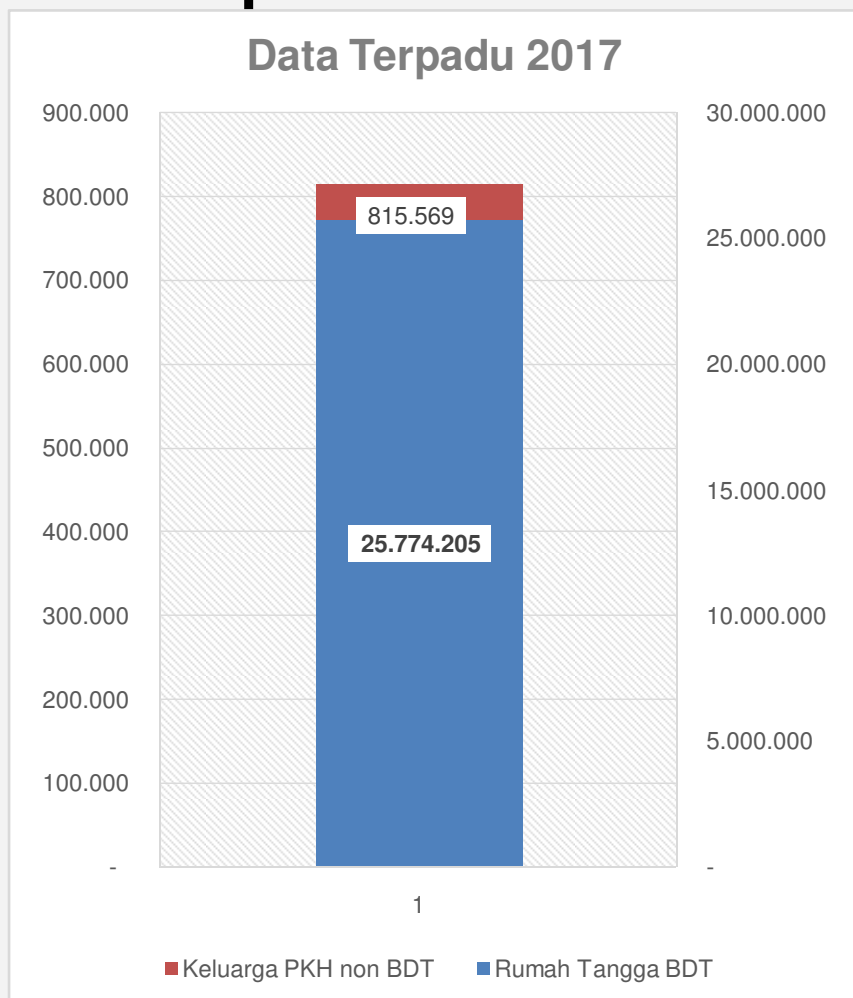


# Apa Isi Data Terpadu ?

- Contoh data terpadu
- Keterangan variabel dan informasi



# Penambahan Keluarga PKH Non BDT pada BDT 2017



Rumah Tangga BDT	Keluarga PKH (non BDT)
25,774,205	815,569

Total Rumah Tangga	Total Keluarga
26,589,774	28,488,031

## Kota Tanjung

Total Rumah Tangga	Total Individu
14.500	67.686

# Karakteristik Rumah Tangga Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

Identitas RTS	Demografi	Ketenagakerjaan	Perumahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama Kepala RTS</li> <li>• Alamat/SLS</li> <li>• Desa</li> <li>• Kecamatan</li> <li>• Kabupaten/Kota</li> <li>• Provinsi</li> <li>• Jumlah Anggota RTS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama anggota RTS</li> <li>• Hubungan dengan Kepala RTS</li> <li>• Jenis kelamin</li> <li>• Umur</li> <li>• Status perkawinan</li> <li>• Kepemilikan kartu ID</li> <li>• <b>No. Induk Kependudukan (NIK)</b></li> <li>• <b>Akte/Buku Nikah</b></li> <li>• <b>Akte Cerai</b></li> <li>• <b>Akte Kelahiran</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan bekerja</li> <li>• Lapangan kerja</li> <li>• Status/kedudukan pekerjaan</li> <li>• <b>Usaha Mikro Kecil (UMK): pemilik usaha, jenis usaha, jumlah tenaga kerja, omset.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status penguasaan bangunan tempat tinggal</li> <li>• Luas lantai</li> <li>• Luas bangunan</li> <li>• Jenis lantai</li> <li>• Jenis dinding</li> <li>• Jenis atap</li> <li>• Sumber air minum</li> <li>• Cara memperoleh air minum</li> <li>• Sumber penerangan</li> <li>• Kelas daya listrik terpasang</li> <li>• Bahan bakar untuk memasak</li> <li>• Tempat buang air besar</li> <li>• TPA tinja</li> <li>• <b>Kamar tidur</b></li> </ul>
Kepesertaan Program	Kesehatan	Kepemilikan Aset	Pendidikan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKH</li> <li>• Raskin</li> <li>• Jamkesmas</li> <li>• Asuransi kesehatan lain</li> <li>• Jamsostek</li> <li>• <b>KKS</b></li> <li>• <b>KIP</b></li> <li>• <b>BPJS/KIS</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis cacat</li> <li>• Penyakit kronis menahun</li> <li>• Status kehamilan wanita</li> <li>• <b>Penggunaan alat/ cara KB</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobil</li> <li>• Sepeda Motor</li> <li>• Perahu Motor</li> <li>• Kapal Motor</li> <li>• Sepeda</li> <li>• Perahu</li> <li>• Lemari es</li> <li>• Tabung gas</li> <li>• <b>Penguasaan lahan</b></li> <li>• <b>Kepemilikan ternak</b></li> <li>• <b>Emas</b></li> <li>• <b>HP</b></li> <li>• <b>TV</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi sekolah</li> <li>• <b>Status sekolah</b></li> <li>• Kelas/jenjang tertinggi</li> <li>• Ijazah tertinggi</li> </ul>

Catatan: Warna merah adalah variabel baru 2015

## Rumah Tangga Mana yang **Lebih Berhak Menerima Bantuan?**



**Lebih berhak menerima Bantuan karena kondisi anggota keluarga lain tidak bekerja, memiliki jumlah tanggungan lebih banyak, dan kondisi pasangan tidak bekerja.**

# STAT PLANET

**Terima kasih**

---

